

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara yang sudah maju pasti diawali dengan adanya proses pertumbuhan, pertumbuhan ini secara jangka panjang akan menggambarkan pembangunan tak terkecuali yakni pembangunan ekonomi, begitu pula pada negara-negara sedang berkembang atau biasa disebut dengan negara dunia ketiga. Pembangunan ekonomi merupakan suatu hal yang harus diwujudkan dan mendapatkan perhatian ekstra pada negara yang sedang berkembang demi mencapai kesejahteraan bangsa dan menjadi bagian dari negara yang maju dalam bidang ekonomi maupun bidang lainnya.

Pembangunan dalam arti luas dapat dipandang sebagai suatu proses atau usaha multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan penerimaan dan pengentasan kemiskinan. Para ekonom berpendapat sama dalam mendefinisikan pembangunan ekonomi dalam arti kenaikan penerimaan atau output nyata per kapita.¹ Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan (*strong and sustainable growth*) harus berasal dari produktivitas yang meningkat.² Suatu kenaikan jangka

¹ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) p. 5

² Velix V. Wanggai, *Pembangunan untuk semua*, (Jakarta: PT Indomultimedia communications grup, 2012) p. 153

pendek dalam penerimaan nasional yang terjadi selama pasang naik siklus bisnis tidak disebut sebagai pembangunan ekonomi.³

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi yang dijalankan salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk melihat kenaikan dalam tingkat penerimaan perkapita. Pertumbuhan dapat diukur secara obyektif dengan melihat perluasan tenaga kerja, modal, volume perdagangan dan konsumsi.⁴

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat dalam kurun waktu 2015 ini mendorong perbaikan insfrastuktur dan paket kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Pembangunan infrastuktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi dan ekonomi yang tumbuh kuat memiliki relasi yang positif dengan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastuktur.⁵ Indonesia perlu pertumbuhan ekonomi yang setinggi mungkin agar pemerintah optimal menciptakan lapangan kerja.⁶ Penciptaan lapangan kerja itu untuk menunjang penerimaan perkapita atau penerimaan rata-rata suatu penduduk daerah yang dijadikan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi pula.

Sejalan dengan presiden Republik Indonesia yang berharap bahwa pembangunan Indonesia berasal dari peranan daerah. Maka terlebih dahulu memerlukan penempatan alokasi dana daerah yang optimal bagi daerah-daerah di Indonesia. Indonesia yang sudah menjalankan desentralisasi fiskal sejak

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ Velix V. Wanggai, *op. cit.*, p. 145

⁶ m.merdeka.com/uang/darmin-kita-perlu-pertumbuhan-ekonomi-di-atas-6-persen.html (diakses tanggal 20 Desember 2015 pukul 09.05 WIB)

diberlakukannya otonomi daerah pada 1 Januari 2001 itu berharap aspek kemandirian pada daerah dalam bidang fiskal dapat menggali penerimaan daerah itu sendiri dan mengalokasikan dana secara optimal sebagai prioritas pembangunan daerah. Sebab kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan alat atau instrumen pemerintah yang sangat penting peranannya dalam sistem perekonomian. Instrumen fiskal berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperluas lapangan usaha dalam berbagai sektor untuk mengurangi pengangguran. Selama ini banyak negara berkembang yang mencoba menerapkan desentralisasi fiskal dengan tujuan untuk mengatasi ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintahan, ketidakstabilan makroekonomi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonominya tak terkecuali Indonesia.

Dorongan desentralisasi yang terjadi di berbagai negara di dunia terutama di negara-negara berkembang itu, dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya, latar belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi di beberapa negara, dan yang terakhir, banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintahan sentralistis dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif.⁷

⁷ Machfud Sidik, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*, materi ini disampaikan pada seminar nasional "Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi daerah di Indonesia" (Yogyakarta, 2002).

Tujuan awal Indonesia menerapkan desentralisasi fiskal itu sendiri untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antardaerah, dengan begitu pengalokasian transfer ke daerah diharapkan menjadi tepat sasaran, tepat waktu, efisien dan adil. Kondisi wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dan masyarakatnya yang majemuk menyebabkan adanya perbedaan antar provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah pusat yang tidak terjun langsung ke daerah akan kesulitan dalam mengakomodasi kepentingan daerah, oleh karena itu adanya desentralisasi fiskal diharapkan mengakomodasi preferensi dari tiap masyarakat daerah karena pemerintah daerah tersebut lebih mengetahui apa saja yang menjadi preferensi bagi kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Desentralisasi fiskal yang diwujudkan di Indonesia bertumpu pada alokasi pusat ke daerah berupa dana perimbangan. Dana ini disalurkan pemerintah guna mengurangi ketimpangan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota.⁸ Berikut adalah data dana perimbangan yang disalurkan pemerintah pusat kepada provinsi/kabupaten/kota dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

Tabel I.1
Perkembangan Dana Perimbangan (miliar rupiah)

	2010	2011	2012	2013	2014
DAU	203.571,5	225.533,7	273.814,4	311.139,3	349.229,0
DAK	20.956	24.803,5	25.941,5	30.752,4	33.000,0
DBH	92.183,5	96.909,0	111.537,2	88.463,1	117.663,6
Jumlah Dana Perimbangan	316.711,3	347.246,2	411.293,1	430.354,7	491.882,9

Sumber: data pokok apbn 2015, www.kemenkeu.go.id (data diolah penulis tahun 2016)

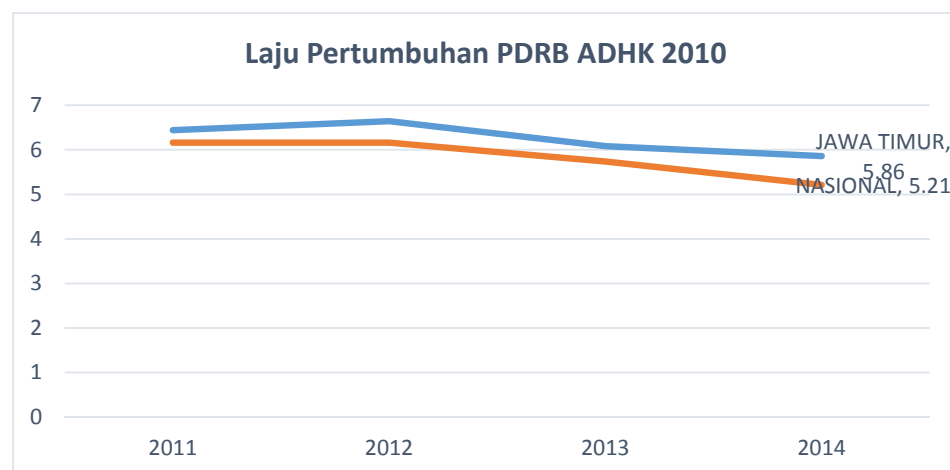
⁸ Puji Wibowo, *Mencermati dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi*. (Jurnal Keuangan Publik, 2008)

Dari data yang diperoleh, dapat ditunjukkan bahwa terjadi peningkatan secara signifikan jumlah yang dialokasikan ke daerah untuk semua jenis dana perimbangan, dimana peran Dana Alokasi Umum (DAU) dalam dana perimbangan sangatlah menonjol, sedangkan peran Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah yang terkecil terhadap dana perimbangan. Besarnya peran DAU dan juga Dana Bagi Hasil (DBH) juga menunjukkan bahwa dalam era desentralisasi saat ini, pemerintah daerah memperoleh kepercayaan yang sangat besar dalam penggunaan dana transfer dari pusat, mengingat bahwa penggunaan kedua jenis dana perimbangan tersebut sama sekali tidak diatur oleh pemerintah pusat.

Kenaikan dana perimbangan tersebut tentunya untuk mendukung penyelenggaraan desentralisasi fiskal di Indonesia agar kewenangan daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada daerahnya semakin luas untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan pembangunan ekonomi daerah. Data yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan, Jawa Timur adalah Provinsi yang mendapatkan dana perimbangan tertinggi dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp45.000.625.003.841 dengan presentase terbesarnya untuk Dana Alokasi Umum sebesar 50%. Sementara itu jika dilihat dari sisi Penerimaan lain yakni Penerimaan Asli Daerah (PAD), Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 memperoleh PAD sebesar 11,60 Triliyun tertinggi ke-3 setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat.⁹

⁹ Mega Sistiana dkk, Derajat Desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2010. (Artikel Ilmiah Penelitian Mahasiswa)

Kondisi saat ini yang terjadi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 5,5% dan ada provinsi yang tumbuh dibawah rata-rata nasional (NAD, Riau, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jateng, DIY, Kalbar, Kaltim, Babel, NTB, NTT, Maluku).¹⁰ Dan ada pula Provinsi yang perekonomiannya tumbuh diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pusat pertumbuhan ekonomi masih di dominasi pada daerah pulau Jawa dan disusul daerah Sumatra. di Pulau Jawa itu sendiri selain ibu kota Jakarta ada provinsi yang menjadi salah satu dari pusat pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu Jawa Timur.



Sumber: *simreg.bappenas.go.id* (diolah penulis tahun 2016)

Gambar I.1

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Dibandingkan Nasional

Berdasarkan gambar I.1 diatas, kinerja ekonomi Provinsi Jawa Timur selama tahun 2012-2014 cenderung mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan ekonmi selama periode tersebut sebesar 6,3 persen lebih tinggi dari dari laju pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sebesar 5,90 persen.

¹⁰ *m.kompasiana.com/percepatan-pembangunan-dengan-desentralisasi-fiskal.html* (diakses pada 20 Desember pukul 09.30 WIB)

Studi hasil penelitian mengenai hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi masih menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda di setiap daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang digambarkan melalui kewenangan daerah mengatur pengeluaran dan pemberian penerimaan daerah melalui dana bantuan (*grants*), membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana desentralisasi fiskal yang terjadi di kabupaten/kota Jawa Timur dan pengaruhnya bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah desentralisasi fiskal pada indikator kapasitas pengeluaran mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah desentralisasi fiskal pada indikator kapasitas pendapatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka penelitian ini difokuskan pada melihat seberapa besar pengaruh desentralisasi fiskal melalui indikator-indikator yang telah ditentukan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur. Maka judul penelitian ini adalah “*Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur.*”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh desentralisasi fiskal dari indikator kapasitas pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimanakah pengaruh desentralisasi fiskal dari indikator kapasitas pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis:

Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna bagi pengembangan penelitian dan pengetahuan mengenai hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Kegunaan Praktis:

Dapat memberikan masukan bagi pembaca maupun pemerintah Jawa Timur mengenai gambaran desentralisasi fiskal, sehingga kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan akan semakin efektif bila memang terdapat hubungan yang positif. Namun bila didapati ketidaksesuaian penerapan desentralisasi fiskal maka diharapkan penelitian ini akan memberikan masukan agar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Jawa Timur berjalan dengan tepat.